**KEBIJAKAN MUTU SPMI INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)**

**MIFTAHUL ULUM TANJUNGPINANG**

****

## PENYUSUN

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN MUTU IAI MIFTAHUL ULUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IAI MIFTAHUL ULUM TANJUNGPINANG** | | |
|  | Jln. Kepodang IV Km. 11, Batu IX, Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Kepri | Kode/No:  LPM-IAIMU/SPMI/KBJ/2024 |
| **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL** | Tanggal: |
| Revisi: 0 |
| Halaman: 25 |

KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU

INTERNAL (SPMI) IAI MIFTAHUL ULUM

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggungjawab** | | | **Tanggal** |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** |
| Perumusan | Dr. Saripuddin,M.Pd.I | Ketua LPM |  | Juni 2024 |
| Persetujuan | Dra. Hj Mardiah, MM | Rektor IAI  MU |  | Juni 2024 |
| Penetapan | Dra. Hj Mardiah, MM | Ketua Senat |  | Juni 2024 |
| Pengendalian | Suhardiman, M.Pd.I | Wakil Rektor I |  | Juni 2024 |

# TIM PENYUSUN

Tim penyusun Standar Mutu IAI Miftahul Ulum Tahun 2024 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Ketua IAI Miftahul Ulum Nomor: …../SK/IAI-MU/II/2024 Tanggal …… 2024 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

# Penanggung Jawab

Dra. Hj Mardiah, MM

# Ketua Tim

Dr. Saripuddin,M.Pd.I

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dengan partisipasi pimpinan dan civitas akademika, IAI Miftahul Ulum Tanjungpinang telah dapat menyelesaikan dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dokumen mutu ini merupakan amanah dari Kemenristekdikti yang sedang diusulkan pengesahannya dari senat IAI Miftahul Ulum Tanjungpinang. Keberadaan Kebijakan Mutu ini merupakan pengembangan dari Kebijakan Akademik IAI Miftahul Ulum Tanjungpinang dan disesuaikan dengan Permenristekdik No. 44 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Statuta IAI Miftahul Ulum Tanjungpinang.

Kebijakan Mutu IAI Miftahul Ulum Tanjungpinang ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Standar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu dan Pengelolaan Penjaminan Mutu di lingkungan IAI Miftahul Ulum Tanjungpinang. Kami menyampaikan terima kasih yang pada semua pihak internal dan eksternal IAI Miftahul Ulum Tanjungpinang yang telah membantu penyusunan dokumen Kebijakan Mutu ini. Kritik, saran, dan masukan kami tetap diharapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini. Kami berharap bahwa Kebijakan Mutu ini digunakan oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen SPMI ini, sehingga kita mampu mengakselerasi perwujudan Budaya Mutu di IAI Miftahul Ulum Tanjungpinang untuk mewujudkan visi IAI Miftahul Ulum Tanjungpinang.

Tanjungpinang, …… 2024 Ketua Senat

IAI Miftahul Ulum Tanjungpinang,

Dra. Hj Mardiah, MM

**DAFTAR ISI**

Halaman

COVER .................................................................................................................. 1

[TIM PENYUSUN .................................................................................................. 3](#_TOC_250016)

[KATA PENGANTAR ........................................................................................... 4](#_TOC_250015)

[DAFTAR ISI .......................................................................................................... 5](#_TOC_250014)

[BAB I PENDAHULUAN 6](#_TOC_250013)

[1.1. Sejarah Singkat IAI Miftahul Ulum 6](#_TOC_250012)

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI 8

* 1. [Pernyataan Visi 8](#_TOC_250011)
  2. [Pernyataan Misi 8](#_TOC_250010)
  3. [Pernyataan Tujuan 8](#_TOC_250009)
  4. [Tata Nilai 9](#_TOC_250008)

[BAB III LATAR BELAKANG 10](#_TOC_250007)

* 1. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu 11
  2. Sasaran Mutu Sistem Penjaminan Mutu 12

BAB IV RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI IAI MIFTAHUL ULUM 14

[BAB V ISTILAH DAN DEFINISI 15](#_TOC_250006)

BAB VI GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI IAI MIFTAHUL ULUM 17

* 1. [Pernyataan Mutu IAI MIFTAHUL ULUM 17](#_TOC_250005)
  2. [Tujuan SPMI IAI MIFTAHUL ULUM. 17](#_TOC_250004)
  3. [Strategi SPMI IAI MIFTAHUL ULUM 17](#_TOC_250003)
  4. Azas Pelaksanaan SPMI IAI MIFTHAUL ULUM 18
  5. [Prinsip Pelaksanaan SPMI IAI MIFTAHUL ULUM 18](#_TOC_250002)
  6. [Manajemen SPMI IAI MIFTAHUL ULUM 18](#_TOC_250001)
  7. Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat 21
  8. [Ruang Lingkup Standar SPMI 22](#_TOC_250000)

BAB VII INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAINNYA .. 24

DAFTAR RUJUKAN 25

## BAB I PENDAHULUAN

## Sejarah Singkat IAI Miftahul Ulum

Institut Agama Islam (IAI) Miftahul Ulum Tanjungpinang awalnya adalah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Miftahul Ulum Ulum Tanjungpinang didirikan pada tanggal 9 Agustus 1989 atas prakarsa dari H.Bakhri Syukur,B.A melalui Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Miftahul ‘Ulum (YPPTMU) dengan Akte Notaris R.Minarno Hardjo Koesoemo, SH Tanjungpinang No.50, tertanggal 29 Juni 1989 maka diangkatlah pengurus yaitu: Ketua H.Bakhri Syukur, B.A, Wakil Ketua I, H.Umar Awaluddin, Wakil Ketua II Soegeng, Sekretaris Dja’afar, B.A, Bendahara, Dra. Mardiah, Anggota Abdul Madjid, Drs. Abdul Razak, dan Drs.Syahrin. Adapun Landasan hukum didirikannya STIT Miftahul Ulum Tanjungpinang adalah:

* + 1. SK Ketua Yayasan Islamiyah Tanjungpinang Nomor: 15/YMI/1988 tgl 1 Oktober 1988 tentang pembentukan dan penunjukan pengelola pondok pesantren Miftahul Ulmum.”an.Bakhri Syukur, BA”
    2. Rekomendasi/persetujuan Bupati KDH TK II Kab. Kep. Riau Nomor:

144/451.44/kesra, tanggal 12 januari 1989 tentang pendidikan/pembukaan STIT di Tanjungpinang

* + 1. Rekomendasi Kakanwil Dep. Agama Propinsi Riau Nomor: wd/1/140/1989 tanggal 30 januari 1989 tentang pendirian/pembukaan STIT di Tanjungpinang
    2. Surat Rektor/Ketua Kopertais Wilayah VI Sumbar, Riau, Jambi Nomor: 036/kop.VI/1/1989 tanggal 2 Februari 1989 tentang pendirian/pembukaan STIT tahun akademi 1989/1990 di Tanjungpinang
    3. Surat Rektor/Kopertais wilayah VI Sumbar, Riau, Jambi Nomor: 119/Kop.VI/5/1989, Tanggal 3 Mei 1989 tentang izin memulai kegiatan perkuliahan di STIT Tanjungpinang untuk tahun akademi 1989/1990

Pada tahun 1990 STIT Miftahul Ulum Tanjungpinang mendapat status izin terdaftar dengan SK Menteri Agama Nomor 235 dengan jurusan tunggal Pendidikan Agama Islam (PAI) S1. Seiring dengan perkembangan daerah, dan perubahan Keputusan Menteri Agama tentang perluasan pengembangan ilmu pada PTAI, maka pada tahun 1997, STIT Miftahul Ulum Tanjungpinang beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (IAI) Miftahul

Ulum Tanjungpinang dan terus mengembangkan diri dengan membuka Program Studi baru yang disesuaikan dengan tuntunan perkembangan daerah berdasarkan perkembangan dalam menjawab tantangan ke depan. Pada Tahun 2001 IAI Miftahul Ulum membuka jurusan S1 Tadris Bahasa Inggris dan Program D2 PGSD/MI dan PGTK/RK, kemudian sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menutup program D2, maka perlu menambah program studi baru. Pada tahun 2005 dibuka program studi Ekonomi Islam/Syariah. Pada tahun 2014 dibuka program S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah sampai sekarang. Semua program studi sudah terakreditasi BAN-PT termasuk Akreditasi Institusi (AIPT).

Periodesasi Kepemimpinan Ketua/Rektor IAI Miftahul Ulum semenjak berdiri sampai sekarang sudah mengalami 8 kali pergantian ketua, yaitu : Drs. H. Idris Samad, Drs. Abdul Razak Z, Drs. H. Wan Izhar Abdullah, Drs. Umar Natuna, Drs. Muhammad Idris, DM, Pauzi, S.Ag, Pauzi, S.Ag, M.Si, Drs. H. Amir Husin,MM, Dra. Hj Mardiah, MM

## BAB II

**VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI**

Keberadaaan sistem penjaminan mutu merupakan amanah dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dengan adanya sistem penjaminan mutu, IAI Miftahul Ulum akan berupaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Mutu pendidikan IAI Miftahul Ulum adalah pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan. Berdasarkan konsep mutu pendidikan tinggi ini, IAI Miftahul Ulum dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui penyelenggaraan misi yang diamanahkan dan mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sebagai acuan utama untuk menyusun dokumen sistem penjaminan mutu internal adalah visi, misi, tujuan dan nilai IAI Miftahul Ulum.

## Pernyataan Visi

“Menjadikan Institut Agama Islam Miftahul’Ulum Tanjungpinang sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi yang melahirkan sarjana muslim yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia, serta mengusai Ilmu pengetahuan dan Teknologi.”

## Pernyataan Misi

* + 1. Menghasilkan sarjana yang memahami Islam secara kaffah
    2. Memberikan landasan moral terhadap pengembangan iptek melalui pengkajian dan penelitian.
    3. Memberikan penekanan pengajaran pada peningkatan kwalitas pendidikan
    4. Mendidik mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang bermoral, berkemantapan akidah dan kedalaman spiritual.
    5. Menyiapkan sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan TRIDHARMA Perguruan Tinggi.

## Pernyataan Tujuan

* + 1. Menyiapakan pesrta didik yang berakhlak mulia menjadi anggota masyarakat yang memilki kemampuan, keunggulan akademik, propesional yang dapat menerapkan, mengembangkan ilmu agama islam, teknologi, seni dan ilmu lain yang terkait
    2. Menggali, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu agama islam, dan ilmu lain yang terkait serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatakan martabat dan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional.

## Tata Nilai

1. Kepemimpinan yang kuat (*Strong Leadership*), menunjukkan perilaku yang visioner, kreatif, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, dan bertanggung jawab,
2. Kreativitas dan Inovasi (*Creativity and Innovation*), selalu mencari idea-idea baru untuk dapat menjalankan tugas/perannya dengan lebih baik,
3. Etika dan Integritas (*Ethics and Integrity*), dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada normanorma atau peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, negara, dan agama, serta kaidah moral dan etika ilmu pengetahuan,
4. Sinergi (*Synergy*), bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki Universitas Syiah Kuala,
5. Ekselensi (*Excellence*), berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna, dan
6. Kebersamaan Sosial dan Tanggung Jawab Sosial (*Socio-cohesiveness and Social Responsibility*), menjaga kerukunan dan peduli terhadap masyarakat sekitar.

## BAB III LATAR BELAKANG

Organisasi yang sehat sangat berkaitan dengan keadaan mutunya baik aspek akademik maupun non-akademik, dan sebaliknya mutu yang baik akan menyebabkan organisasi berjalan secara baik. Pentingnya upaya penjaminan mutu dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, **jaminan mutu** dan evaluasi yang transparan*.* Prinsip penjaminan mutu ini diselenggarakan oleh IAI Miftahul Ulum melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada IAI Miftahul Ulum didasarkan pada Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang relevan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

|  |  |
| --- | --- |
| Pasal 51 | Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) |
| Pasal 52 | SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi(Standar Dikti) |
| Pasal 53 | Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) harus dikembangkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan berdasarkan pada  Pangkalan Data Pendidikan Tinggi |

Dalam tataran implementatif, rujukan pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan SPMI. Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti, menyebutkan SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

1. Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
2. Non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana. Dengan memperhatikan kepentingan tersebut, keberadaan Kebijakan SPMI IAI Miftahul Ulum ini diharapkan dapat:
3. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal IAI Miftahul Ulum (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) tentang garis besar SPMI IAI Miftahul Ulum;
4. Memberikan dasar bagi penyusunan dan penetapan Dokumen Standar Mutu, Dokumen Manual Mutu, dan Formulir Mutu;
5. Menjadi acuan utama dalam menyusun rencana program dan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan tridarma IAI Miftahul Ulum; dan
6. Membuktikan bahwa Penjaminan Mutu di IAI Miftahul Ulum terdokumentasi dengan baik dan diakui keberadaannya oleh pihak eksternal.

## 3.1 Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu IAI Miftahul Ulum

Kebijakan Dasar SPM IAI Miftahul Ulum adalah memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh IAI Miftahul Ulum untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tri dharma Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dijalankan secara berkelanjutan oleh IAI Miftahul Ulum, dan akan dievaluasi melalui sistem penjaminan mutu

eksternal (SPME) atau akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di IAI Miftahul Ulum dapat diwujudkan.

Kebijakan Dasar SPM IAI Miftahul Ulum mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal dijalankan sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau SPME dan dalam lingkup bidang tridharma dan unsur penunjang perguruan tinggi, yakni:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Layanan Kemahasiswaan;
5. Kerjasama; dan
6. Tata Kelola.

Implementasi SPM IAI Miftahul Ulum harus disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) para civitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, SPM IAI Miftahul Ulum bersifat *taylor made*, yaitu dibangun dengan memperhatikan keadaan dan karakteristik IAI Miftahul Ulum. Selanjutnya, implementasi SPM tersebut akan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan budaya mutu (*quality culture*) pada setiap civitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat atau tekad yang muncul dari dalam diri para civitas akademika (*internally driven*).

## 3.2. Sasaran Mutu Sistem Penjaminan IAI Miftahul Ulum

Sasaran Mutu SPM IAI Miftahul Ulum dirumuskan dalam beberapa parameter luaran yang menggambarkan perpaduan adanya SPMI yang efektif dan pengakuan eksternal terhadap kredibilitas IAI Miftahul Ulum, yakni:

1. Keterlaksanaan SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat Institusi dan program studi;
2. Mendukung capaian target akreditasi IAI Miftahul Ulum dapatkan A pada tahun 2035, target akreditasi program studi peringkat A 30% dan peringkat B 60% di tahun 2031, dan target akreditasi internasional atau yang setara untuk 10 program studi di tahun 2032;
3. Mendukung capaian perguruan tinggi nasional 20 besar pemeringkatan Kemristekdikti dan Webometric di tahun 2032; dan
4. Memperkuat basis pencapaian visi sebagai universitas yang inovatif, mandiri dan terkemuka di level regional di tahun 2035.

## BAB IV

**RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI IAI MIFTAHUL ULUM**

Untuk dapat memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran SPMI IAI Miftahul Ulum dan sejalan dengan Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIKTI, SPMI IAI Miftahul Ulum diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

1. Aspek akademik, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan; dan
2. Aspek non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan kerjasama.

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar mutu IAI Miftahul Ulum untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
2. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IAI Miftahul Ulum.

Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada:

1. Deskripsi standar dalam Permenritekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan tingkat capaian memenuhi atau melampaui standar;
2. Visi IAI Miftahul Ulum yang dirumuskan pada tingkat capaian Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis IAI Miftahul Ulum 2023 - 2027

## BAB V ISTILAH DAN DEFINISI

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

## BAB VI

**GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI** IAI **MIFTAHUL ULUM**

## 4.1. Pernyataan Mutu IAI Miftahul Ulum

Menggenggam MUTU, mengutamakan PRESTASI, meningkatkan DAYA SAING untuk mewujudkan VISI IAI MIFTAHUL ULUM 2035

## 4.2 Tujuan SPMI IAI Miftahul Ulum

Tujuan penetapan dan pelaksanaan kebijakan SPMI di IAI Miftahul Ulum yaitu:

1. Memastikan terselenggarakannya standar pendidikan tinggi di IAI Miftahul Ulum;
2. Memastikan arah penyelenggaraan tridarma sesuai dengan Visi dan Misi IAI Miftahul Ulum; dan
3. Sebagai acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi di IAI Miftahul Ulum.

## Strategi SPMI IAI Miftahul Ulum

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di IAI Miftahul Ulum dilakukan sejumlah strategi pelaksanaan yang meliputi:

1. Mempelajari landasan yuridis terkait penjaminan mutu perguruan tinggi;
2. Mengkaji visi, misi dan tujuan IAI Miftahul Ulum;
3. Melakukan *benchmarking* ke institusi pendidikan tinggi lain;
4. Menentukan organisasi Penjaminan Mutu;
5. Menentukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
6. Menetapkan peraturan rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu;
7. Merancang dokumen SPMI;
8. Melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu; dan
9. Melaksanakan siklus SPMI (tahapan PPEPP).

## Azas Pelaksanaan SPMI IAI Miftahul Ulum

1. Utamakan mutu
2. Berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan
3. Analisis berbasis fakta
4. Partisipatif
5. Transparan
6. Akuntabel
7. Pendekatan inovatif
8. Perbaikan bertahap dan berkelanjutan

## Prinsip Pelaksanaan SPMI IAI Miftahul Ulum

1. Otonom, yakni Kebijakan SPMI IAI Miftahul Ulum dikembangkan secara independen dan mandiri oleh IAI Miftahul Ulum dan diimplementasikan di lingkup IAI Miftahul Ulum.
2. Terstandar, yakni Kebijakan SPMI IAI Miftahul Ulum menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi-Misi-Indikator Kinerja Utama IAI Miftahul Ulum dan kriteria penjaminan mutu eksternal.
3. Akurasi, yakni SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya (*speak with data*).
4. Berencana dan Berkelanjutan, yakni SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan.
5. Terdokumentasi, yakni seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.

## Manajemen SPMI IAI Miftahul Ulum

Semangat yang mendasar dari suatu sistem penjaminan mutu adalah perbaikan dan peningkatan mutu secara *berkelanjutan* (*continuous improvement*). Perbaikan dan penyempurnaan yang terus menerus menjadi falsafah manajemen Jepang yang terkenal dengan istilah *Kaizen* (*Kai* = perubahan, *Ze*n = lebih baik). *Kaizen* berarti perubahan dan

penyempurnaan yang lebih baik dan berkelanjutan (diilustrasikan pada Gambar) yang melibatkan setiap pihak internal dari segala tingkatan dalam hierarki sebuah organisasi. Pesan dari strategi *Kaizen* adalah tidak satu haripun boleh berlalu tanpa sesuatu tindakan penyempurnaan dalam suatu organisasi. *Kaizen* mengutamakan kesadaran akan adanya masalah dan memberikan cara untuk mengidentifikasi masalah. Menurut falsafah *Kaizen*, penyempurnaan mutu yang berkelanjutan hanya akan terjadi bila ada kepedulian mutu (*quality awareness*) dari manusia. Sehingga tepat apa yang dikatakan oleh W. Edwards Deming bahwa mutu adalah tanggung jawab setiap orang (*quality is everyone’s responsibility*).

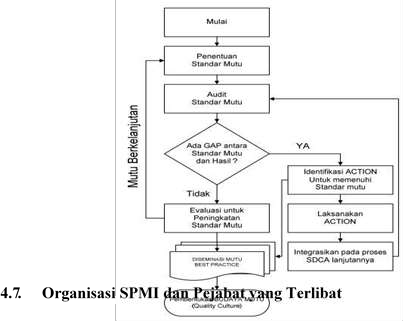


Gambar Prinsip Kaizen dalam Peningkatan Mutu Berkelanjutan

Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:

1. Penetapan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IAI Miftahul Ulum;
2. Pelaksanaan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IAI Miftahul Ulum;
3. Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IAI Miftahul Ulum;
4. Pengendalian (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IAI Miftahul Ulum yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh IAI Miftahul Ulum agar lebih tinggi daripada standar mutu yang telah ada.

Model SPMI berbasis tahapan PPEPP akan diimplementasi sebagaimana dijelaskan di atas dapat diilustrasikan pada Gambar sebagai berikut:



Berdasarkan hasil evaluasi internal pimpinan IAI Miftahul Ulum Tentang Sistem Penjeminan Mutu Internal (SPMI), organisasi mutu IAI Miftahul Ulum dengan pihak-pihak internal yang terlibat. Hubungan LPM dan SPMP bersifat koordinatif, konsultatif dan fasilitatif.

Fungsi setiap aras organisasi mutu adalah berbeda, yaitu:

1. Tingkat Universitas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (Total Quality Management/Quality Assurance);
2. Tingkat Fakultas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (Total Quality Management/Quality Assurance);
3. Tingkat Jurusan: Fungsi pengendalian mutu total (Total Quality Control); dan
4. Tingkat Program Studi: Fungsi pengendalian mutu (Quality Control).

Implementasi SPMI IAI Miftahul Ulum melalui organisasi mutu akan terlaksana secara efektif dengan keterlibatan berbagai pihak internal dan eksternal pada tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan peningkatan standar mutu baik secara invidual maupun bersama-sama sesuai peran dan kewenangan masing-masing. Pihak-pihak internal yang terlibat adalah:

1. Senat IAI Miftahul Ulum;
2. Rektor IAI Miftahul Ulum;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan
5. Ketua LPM;
6. Ketua LPPM;
7. Kepala Biro;
8. Kaprodi;
9. Para Sekretaris Prodi;
10. Dosen;
11. Kepala UPT;
12. Satuan Jaminan Mutu Prodi (SJMP);
13. Mahasiswa;
14. Tenaga Kependidikan;
15. Alumni; dan
16. Pengguna Lulusan.

## 4.8. Ruang Lingkup Standar SPMI

IAI Miftahul Ulum menjalankan SPMI dengan acuan pada standar mutu IAI Miftahul Ulum yang terdiri dari 40 standar, yang mencakup 24 standar mutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diperluas dan 16 standar mutu yang dikembangkan untuk mendukung pencapaian Visi IAI Miftahul Ulum. Tabel berikut memperlihatkan deskripsi setiap Standar Mutu dan Cakupan Standar Mutu masing-masing.

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **STANDAR MUTU** |
| I | Bidang Pendidikan : |
| 1 | Standar Kompetensi Lulusan |
| 2 | Standar Penerimaan Mahasiswa Baru |
| 3 | Standar Isi Pembelajaran |
| 4 | Standar Proses Pembelajaran |
| 5 | Standar Penilaian Pembelajaran |
| 6 | Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran |
| 7 | Standar Pengelolaan Pembelajaran |
| 8 | Standar Pembiayaan Pembelajaran |
| 9 | Standar Suasana Akademik |
| II | Bidang Penelitian : |
| 10 | Standar Isi Penelitian |
| 11 | Standar Proses Penelitian |
| 12 | Standar Hasil Penelitian |
| 13 | Standar Penilaian Penelitian |
| 14 | Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian |
| 15 | Standar Pengelolaan Penelitian |
| 16 | Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian |
| 17 | Standar Peneliti |
| III | Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) : |

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **STANDAR MUTU** |
| 18 | Standar Hasil PkM |
| 19 | Standar Isi PkM |
| 20 | Standar Proses PkM |
| 21 | Standar Penilaian PkM |
| 22 | Standar Sarana Dan Prasarana PkM |
| 23 | Standar Pengelolaan PkM |
| 24 | Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM |
| 25 | Standar Pelaksana PkM |
| IV | Bidang Layanan Kemahasiswaan : |
| 26 | Standar Layanan Kemahasiswaan |
| 27 | Standar Pengelolaan Alumni |
| V | Bidang Kerjasama : |
| 28 | Standar Pengelolaan Kerjasama |
| 29 | Standar Internasionalisasi Kampus |
| VI | Bidang Tata Kelola : |
| 30 | Standar Visi dan Strategi Pencapaian |
| 31 | Standar Etika |
| 32 | Standar Sistem Penjaminan Mutu |
| 33 | Standar Tata Pamong |
| 34 | Standar Dosen |
| 35 | Standar Tenaga Kependidikan |
| 36 | Standar Layanan Perpustakaan |
| 37 | Standar Layanan Sistem Informasi |
| 38 | Standar Perencanaan Dan Pengembangan SDM |
| 39 | Standar Sarana Prasarana Umum |
| 40 | Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus |
| 41 | Standar Pengelolaan Keuangan |

## BAB VII

**INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAINNYA**

Untuk mendukung implementasi Kebijakan Mutu IAI Miftahul Ulum secara efektif, beberapa dokumen SPMI dalam bentuk lebih operasional telah disusun, yakni:

1. Hasil Evaluasi Internal Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu IAI Miftahul Ulum.
2. Dokumen Standar Mutu

Dokumen standar mutu menguraikan setiap standar mutu IAI Miftahul Ulum tentang latar belakang penetapan standar, pernyataan isi standar, strategi pencapaian dan indikator ketercapaiannya.

1. Manual Mutu

Dokumen manual mutu menguraikan siklus implementasi setiap standar mutu IAI Miftahul Ulum menurut tahapan penetapan-pelaksanaan-evaluasi-perbaikan-peningkatan (PPEPP).

1. Formulir Mutu

Dokumen formulir mutu terdiri berbagai bentuk prosedur, pedoman, formulir atau dokumen lainnya yang mendukung pelaksanaan manual mutu setiap standar mutu.

## REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Kebijakan Akademik IAI Miftahul Ulum Tanjungpinang.
6. Standar Akademik IAI Miftahul Ulum Tanjungpinang.
7. Manual Mutu Akademik IAI Miftahul Ulum Tanjungpinang.